

Tata Tertib DPRD Kabupaten Solok

2025

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan DPRD) NOMOR 1
TAHUN 2025, BD.2025/No. 8, LL SETDA KAB. SOLOK: 49 HLM

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
TENTANG TATA TERTIB

- ABSTRAK : • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diperlukan pengaturan mengenai tata tertib DPRD sebagai pedoman operasional lembaga perwakilan rakyat daerah;
- bahwa Peraturan DPRD ini mengatur secara komprehensif susunan dan kedudukan, fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, serta mekanisme persidangan, pengambilan keputusan, hak dan kewajiban anggota, hingga pelayanan pengaduan masyarakat guna menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Solok;
 - bahwa peraturan ini juga menetapkan tata cara pembentukan Alat Kelengkapan DPRD (AKD), Fraksi, serta mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) dan pemberhentian anggota sesuai dengan dinamika regulasi terkini termasuk pembentukan Kabupaten Solok berdasarkan UU Nomor 51 Tahun 2024. Dasar hukum Peraturan DPRD ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 *jo.* Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan DPRD ini menjadi landasan hukum internal bagi DPRD Kabupaten Solok dalam menjalankan tiga fungsi utama (legislasi, anggaran, dan pengawasan) serta hak-hak DPRD (interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat). Pengaturan ini bertujuan menciptakan mekanisme kerja yang tertib, transparan, akuntabel, dan demokratis, serta memastikan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

- Selain itu, peraturan ini menegaskan kewajiban penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses dan mekanisme pengaduan yang terstruktur, serta mengatur kode etik dan sanksi bagi anggota untuk menjaga marwah lembaga. Dengan berlakunya peraturan ini, seluruh proses kegiatan DPRD Kabupaten Solok memiliki kepastian hukum yang selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional terbaru.

Catatan : • Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025.

- Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Solok (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 9A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan. Ketentuan mengenai hak protokoler, keuangan, dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar satuan harga dan pengelolaan keuangan daerah.